

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulhay, Marheinis. *Hukum Perdata Materiil: Jilid II*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Periklanan*. Bandung: Alumni Bandung, 2002.
- Achmad Ali *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Aristoteles. *Nicomachean Ethics*. New York: Oxford University Press, 1980
- Adrian Sutedi. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Afandi, M. Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Bina Aksara, 2004.
- Ali Afandi. *Hukum Waris*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Boedi Harsono. *Undang-Undang Pokok Agraria Sedjarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Jambatan, 1971.
- Badrulzaman, Mariam Darus. *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 2006.

- Borst, P.N.H.M. Pengantar Hukum Waris Perdata Barat (terjemahan). Jakarta: Dian Rakyat, 2005.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni. Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat (Aansprakelijkheid) untuk Kerugian yang Disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- Efendi Perangin. *Praktek Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Effendi Perangin. *Hukum Waris*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Gustav Radbruch, Legal Philosophy. *diterjemahkan oleh Kurt Wilk*. Oxford: Clarendon Press, 1950.
- Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaften*, Leipzig: Quelle & Meyer, 1947.
- Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia* (Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004), Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Universitas Trisakti, 2018.
- H.F.A.Volmar. *Pengantar Study Hukum Perdata (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Isnaeni Moch. *Perjanjian Jual Beli*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

- Irma D. Purnamasari. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer; Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris, Cet. I.* Bandung: Kaifa, 2012.
- Irzan, SH, MH. *Azas-Azas Hukum Perdata Suatu Pengantar.* Jakarta: LPU UNAS, 2020.
- John Salindeho. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan.* Jakarta: Sinar Grafika, 1987.
- M. Ali Hasan. *Hukum Warisan dalam Islam.* Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Penerbit Kencana, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar.* Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Mujiono. *Hukum Tanah Nasional: Teori dan Praktik Pendaftaran Tanah.* Surabaya: Bina Ilmu, 2024.
- Mulyadi, Lilik. *Tuntunan Praktis Penyusunan Putusan Perdata.* Jakarta: Djambatan, 2002.
- Munir Fuady I. *Perbandingan Hukum Perdata.* Bandung: , Citra Aditya Bakti, 2005.
- Munir Fuady II. *Perbuatan Melawan Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002..
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Waris di Indonesia.* Jakarta: PT Sumur Bandung, 2003.
- R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata.* Jakarta: Intermasa, 1985.
- R.Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata.* Bandung: Bina Cipta, 2007.

- R Suryatin. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- R. Wirjono Prodjodikoro. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Sumur, 2003.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Soedikno Mertokusumo. *Hukum dan Politik Agraria*. Jakarta: Karunika, Universitas Terbuka, 1998.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 2008.
- Soepomo. *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003).
- Syahril Sofyan. *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011.
- Soebekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2002.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2010.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Kencana, 2009.

Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Prof. Mr. Gregor van der Burght. *Hukum Waris*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Prof. D.R. Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1980.

Jurnal:

Diman Ade Mulada Arief Rahman, Zaeni Asyhadie, Shinta Andriyani,

“Pendaftaran Tanah Warisan Belum Dibagi Waris”, *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 2–14,
<https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.21>.

Christiana Sri Murni, “Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan”, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2020): 129–44,
<https://doi.org/http://doi.org/10.5281/zenodo.3904192>.

Sutaryono Alfonsa, Dian Aries Mujiburohman, “Penerbitan Dan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi”, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau* 10, no. 2 (2021): 277–188,
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/jih.v10i2.8095>.

- Ni Made Eka Yanti Purnawan, “Penjualan Harta Waris Berupa Tanah Tanpa Adanya Persetujuan Ahli Waris Lainnya”, *Acta Comitatus* 5, no. 2 (2020): 309, <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i02.p09>.
- Said Ali Assagaff dan Wira Franciska, “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris”, *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1, no. 1 (2021): 279–90.
- Ni Made Eka Yanti Purnawan, Penjualan Harta Waris Berupa Tanah Tanpa Adanya Persetujuan Ahli Waris Lainnya, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 5, Nomor 2, (Agustus 2020): hal. 311.
- Hendra Nurdin, “Penyelesaian Sengketa Peralihan Hak Atas Tanah Warisan dalam Perspektif Hukum Perdata”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* Vol. 3, No. (2021): 134–135.
- Bambang Sutyoso, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Warga Negara”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25 No. 3 (2018): 419.
- Muliawan, “Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 4, No. 1 (2015).
- John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971).
- Makarao, “Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 3 (2014).

Perundang-undangan:

Putusan Nomor 121/Pdt.G/PN.Semarang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663).

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.